WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka untuk tertib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Analisis Standar Belanja yang diberlakukan secara menyeluruh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tetang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK Lhokseumawe adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK Lhokseumawe yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPK.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKU

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMR...	
...AGI...	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabi'ul Akhir 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien dimulai dari awal perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan keuangan daerah. Salah satu upaya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja salah satunya adalah ASB.

ASB sudah dikenal jauh di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, ASB dikenal dengan nama Standar Analisa Belanja (SAB) yang merupakan sebuah instrumen untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian SAB kembali diperkenalkan dengan nama ASB dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBK tahun Anggaran 2022. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (RKA-SKPK), memuat dokumen analisis standar belanja sebagai salah satu lampiran pendukung. Hal ini dimaknai bahwa penyusunan RKA-SKPK berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada ASB, yang merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBK dengan pendekatan kinerja.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPK dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

a. dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
d. penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
e. unit kerja mendapat keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Oleh karena itu, Studi Perhitungan ASB pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah hal yang harus dilaksanakan. Sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

ASB berdasar pada teori, salah satunya adalah teori *Activity Based Costing* (ABC). Teori ini lebih dahulu berkembang di sektor swasta sebelum akhirnya juga dikembangkan di sektor publik. *Activity Based Costing* menurut Horngren dan Foster (2003:39) merupakan "*An approach to osting that focuses on activities as the fundamental cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning costs to other cost objects such as products, services or customer*".

Sementara itu menurut Mulyadi (2003:40), *Activity Based Costing systems* (*ABC Systems*) adalah Sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis dan pengurangan biaya serta penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa dan dagang. Selanjutnya, Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan *Activity Based Costing* sebagai berikut: "*Activity Based Costing is a costing method that is designed to provide managers cost information for strategic and other decision that potentially affect capacity and therefore 'fixed' costs*". Hansen dan Mowen (2003:122) mendefinisikan "*Activity Based Costing systems fist trace cost to activities then to product*". Kemudian Hilton, Maher, dan Selto (2006:14) memberikan pengertian *Activity Based Costing* sebagai berikut: "*Activity Based Costing or ABC is a costing method that*

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

first assigns costs to activities and then to goods services based on how much each good or service use the activities".

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Activity Based Costing* di sektor swasta adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, sehingga aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar. Perhitungan biaya di sektor swasta berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberi kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi).

2.1 Teori ABC di Sektor Publik

Terkait dengan sektor publik, teori ABC ini digunakan di pemerintah daerah dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK. Tiap SKPK perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan. Umumnya metode yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah pemerataan biaya secara umum untuk masing-masing unit. Padahal masing-masing unit tersebut pada kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama. Dalam *Activity Based Costing* ini menggunakan *cost driver* sebagai faktor yang dapat menjelaskan konsumsi biaya-biaya *overhead.* Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya.

2.2 *Cost Driver*

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau *cost driver* untuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya. *Cost driver* merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya *overhead.* Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas. Di sektor swasta, terdapat dua jenis *cost driver*, yaitu:

a. *cost driver* berdasarkan unit

   cost driver berdasarkan unit membebankan biaya *overhead* pada produk melalui penggunaan tarif *overhead* tunggal oleh seluruh departemen;

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

b. *cost driver* berdasarkan non unit

cost driver berdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi *overhead.* Contoh *cost driver* berdasarkan non unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

Dalam pemilihan *cost driver* yang tepat ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan:

a. kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan *cost driver* (*cost of measurement*). *Cost driver* yang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih;
b. korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh *cost driver* terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya 20 (*degree of correlation*). *Cost driver* yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih;
c. perilaku yang disebabkan oleh *cost driver* terpilih (*behavior effect*). *Cost driver* yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih.

2.3 Tahapan dalam *Activity Based Costing*

Tahapan dalam penerapan *Activity Based Costing* adalah sebagai berikut:

a. mengidentifikasi aktivitas atau kegiatan

pengidentifikasian aktivitas atau kegiatan menghendaki adanya daftar jenis-jenis program yang terdapat dalam tiap SKPK;

b. membebankan biaya ke aktivitas atau kegiatan

setiap kali suatu aktivitas atau kegiatan ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan;

c. menentukan *cost driver*

langkah berikutnya adalah menentukan *cost driver* untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut;

d. menentukan tarif

dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total *cost driver* yang digunakan untuk aktivitas tersebut;

e. membebankan biaya ke produk

langkah selanjutnya adalah mengalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan *cost driver* yang dikonsumsi oleh setiap jenis objek belanja kemudian membaginya dengan jumlah *output* kegiatan.

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

3. PENYUSUNAN ASB

Tahapan dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut:

a. Kajian Pustaka

Proses dalam tahap Kajian Pustaka ini adalah studi literatur mengenai proses penghitungan analisis standar biaya berdasarkan metode statistika deskriptif. Beberapa teori dan metode statistika deskriptif dalam menentukan standar biaya akan dikaji berdasarkan asumsi yang mendasari dan kelemahan dari masing-masing teknik statistika tersebut serta kemungkinannya untuk diaplikasikan.

Proses kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan analisis ini. Satu metode yang diterapkan di suatu tempat belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat yang lain. Hal ini tergantung dari berbagai kondisi yang ada di tempat tersebut, termasuk ketersediaan data dan kegiatan di setiap daerah. Langkah-langkah teknis dalam melakukan kajian pustaka adalah sebagai berikut:

i.. menentukan metode analisis standar belanja yang ada;

ii. melakukan analisis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode analisis tersebut;

iii. melakukan analisis kondisi lapangan di Pemerintah Kota Lhokseumawe;

iv. menentukan metode yang akan diterapkan dalam melakukan analisa terhadap ASB.

b. Pengumpulan Data

Proses dalam tahapan ini adalah menginventarisir data seluruh kegiatan pada tahun 2020 dan 2021 pada seluruh SKPK di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa data belanja dalam setiap kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap. Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja, namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBK Perubahan.

c. Penggolongan Kelompok ASB

Data kegiatan dan belanja per SKPK masih merupakan data mentah yang harus dikelompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok belanja-belanja tertentu. Pengelompokan ini untuk mempermudah proses analisa ASB. Setiap kelompok ASB minimal terdiri dari 3 (tiga) sampel kegiatan. Semakin banyak sampel kegiatan yang digunakan dalam sebuah kelompok ASB akan semakin baik. Pengelompokan data

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

dari seluruh SKPK di Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan kelompok sampel kegiatan lintas SKPK. Pemerintah Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki 34 SKPK dan pengelompokannya dilakukan dengan menggabungkan data sampel kegiatan yang serupa yang berasal dari 2 SKPK atau lebih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau hampir seluruh SKPK dan cenderung kegiatan rutin atau pun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPK tertentu. Pengelompokan ini sering disebut dengan ASB umum. Dasar pengelompokan belanja yang dilakukan adalah:

i. memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut;
ii. memiliki *output* yang sama;
iii. memiliki unsur pemicu (*cost driver*) yang sama.

Dalam penyusunan ASB ini, metode yang digunakan adalah menggunakan *student-t distribution*. Metode ini kemungkinan dalam penentuan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah belanja yang diinginkan dari setiap kelompok ASB. Berikut merupakan hasil inventarisasi data-data sampel kegiatan serupa dan sejenis yang sudah disusun berdasarkan kelompok ASB yang dikelompokkan per kegiatan pada lintas SKPK atau ASB umum dalam hal ini adalah:

i. sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
ii. sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, pendidikan dan pelatihan non pegawai;
iii. penyusunan, penelitian, pengkajian, dokumen dan pelaporan;
iv. penyelenggaraan *event*.

Tabel 1
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Tahun 2020

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan PAUD (OTSUS)
2	Disdikbud	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD (OTSUS)
3	Disdikbud	Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP (OTSUS)
4	Disdikbud	Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD dan SMP (OTSUS)
5	Disdikbud	Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP (DID)
6	Disdikbud	Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (OTSUS)
7	Disdikbud	Pelatihan Penyusunan Aset Sekolah Tingkat SD dan SMP (OTSUS)

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

1	2	3
8	Dinkes	Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR)
9	Dinkes	Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH-PR)
10	Dinkes	Pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS) DBH-PR
11	Dinkes	Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan Pada UGD (DBH-PR)
12	Dinkes	Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR)
13	Dinkes	Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR)
14	Dinkes	Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan untuk Industri Rumah Tangga (DBH-PR)
15	Dinkes	Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS) (DBH-PR)
16	Dinkes	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
17	Dinkes	Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Vaksin Imunisasi (DBH PR)
18	Dinkes	Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi (DBH-PR)
19	Dinkes	Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (DBH-PR)
20	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Keracunan Pangan (DBH-PR)
21	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi (DBH-PR)
22	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)
23	Dinkes	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR)
24	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK (DBH-PR)
25	Dinkes	Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa (DBH-PR)
26	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Skrining Kesehatan Lanjut Usia (DBH-PR)
27	Dinkes	Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR)
28	Dinkes	Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Kesehatan (DBH-PR)
29	Dinkes	Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan (DBH-PR)
30	Satpol PP dan WH	Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH
31	Dinsos	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
32	DPMPTSP Naker	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
33	DPMPTSP Naker	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
34	Disdukcapil	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
35	DPMG	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
36	Dishub	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
37	Diskominfo	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
38	Disperindagkop	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
39	Dispusip	Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis
40	Setdako	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
41	Setdako	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
42	Setdako	Sosialisasi Dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota
43	Setdako	Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
44	BPBD	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
45	Inspektorat	Pendidikan Dan Pelatihan Formal

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
46	Inspektorat	Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
47	Inspektorat	Pengembangan Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe
48	Bappeda	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
49	Bappeda	Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS
50	Bappeda	Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional
51	BPKD	Pendidikan Dan Pelatihan Formal (DID)
52	BPKD	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 2
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Tahun 2021

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	Dinkes	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3	BPBD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
4	BPBD	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
5	Satpol	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6	Satpol	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7	Dinsos	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
8	Dinsos	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT
9	Dinsos	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
10	Dinsos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
11	Dinsos	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
12	Dinsos	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
13	Dinsos	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
14	Dinsos	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA
15	DP3AP2KB	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
16	DP3AP2KB	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
17	Disdukcapil	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

1	2	3
18	Disdukcapil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
19	Disdukcapil	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20	DPMG	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
21	DPMG	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
22	Dishub	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
23	DPMPTSP Naker	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
24	DPMPTSP Naker	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
25	DPMPTSP Naker	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
26	Dispusip	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
27	DKPPP	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
28	Disperindagkop	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
29	Setdako	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
30	Setdako	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi.dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
31	Setwan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
32	Setwan	Bimbingan Teknis DPRD
33	Bappeda	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
34	BPKD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
35	BPKD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
36	BKPSDM	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
37	BKPSDM	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
38	BKPSDM	Pengelolaan Promosi ASN
39	BKPSDM	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
40	BKPSDM	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
41	BKPSDM	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
42	BKPSDM	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
43	Inspektorat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
44	DSIPD	Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah/Tajhiz Mayat
45	MPU	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
46	MAA	Sosialisasi Adat Istiadat
47	MPD	Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Tabel 3
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Non Pegawai Tahun 2020

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Pembinaan Sanggar Seni Kota Lhokseumawe
2	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas (DBH-PR)
3	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat (DBH-PR)
4	Dinkes	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR)
5	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)
6	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Program Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat (DBH-PR)
7	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (DBH-PR)
8	Dinkes	Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi (DBH-PR)
9	Dinkes	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH-PR)
10	Dinkes	Sosialisasi Pesantren Sehat (DBH-PR)
11	Dinkes	Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK (DBH-PR)
12	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang GERMAS (DBH-PR)
13	Dinkes	Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia
14	Dinkes	Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR)
15	Dinkes	Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR)
16	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang *Hygiene* dan Sanitasi (DBH-PR)
17	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi (DBH-PR)
18	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB (DBH PR)
19	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular (DBH-PR)
20	Dinkes	Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR)
21	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit Menular (DBH-PR)
22	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit DBD (DBH-PR)
23	Dinkes	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA Tentang Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)
24	Dinkes	Forum Peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)
25	Dinkes	Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR)
26	Kesbangpol	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe
27	Kesbangpol	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
28	Satpol PP dan WH	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
29	Dinsos	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)/Rastra/BPNT
30	Dinsos	Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana
31	Dinsos	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
32	Dinsos	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
33	Dinsos	Pendataan dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Razia Gepeng)
34	DPMPTSP Naker	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
35	DPMPTSP Naker	Pembinaan Dan Pelatihan Wirausaha Bagi Pencari Kerja
36	DPMPTSP Naker	Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan
37	DP3AP2KB	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah
38	DP3AP2KB	Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Rumahan Bagi Perempuan (OTSUS)
39	DP3AP2KB	Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Kota Lhokseumawe
40	DP3AP2KB	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Lhokseumawe
41	DP3AP2KB	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)
42	DPMG	Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
43	DPMG	Bimbingan Teknis BUMG
44	DPMG	Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
45	DPMG	Pembinaan Pengembangan PKK
46	DPMG	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Gampong
47	Disporapar	Pelatihan Jurnalis Pemuda Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
48	Disporapar	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
49	Disporapar	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
50	Disporapar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
51	Disporapar	Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal
52	Disporapar	Seminar Pelaku Usaha Kuliner
53	Setdako	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
54	Setdako	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreativitas Mahasiswa
55	Setdako	Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Da'i
56	Setdako	Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe
57	Setwan	Kegiatan Reses
58	Setwan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
59	Setwan	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi DPRK Lhokseumawe
60	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong
61	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong
62	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
63	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong
64	Kec. Muara Satu	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong
65	Kec. Muara Dua	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong
66	Bappeda	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe
67	Bappeda	Workshop Peningkatan SDM Berkarakter Bagi Milenial Muda Gampong se Kota Lhokseumawe
68	BPKD	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan
69	DSIPD	Pembinaan Qari-qariah Kota Lhokseumawe
70	DSIPD	Pembinaaan Hafiz Hafizah Kota Lhokseumawe
71	DSIPD	Pengembangan Tilawatil Qur'an
72	DSIPD	Pelatihan Tajihiz Mayat dan Hukum Mawaris (OTSUS)
73	DSIPD	Pelatihan Manajemen Dayah
74	DSIPD	Pelatihan Life Skill Santri (OTSUS)
75	MPU.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama
76	MPU	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama (Simposium Hukum Islam)
77	MPU	Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik
78	MPU	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU)
79	MAA	Pelatihan Peradilan Adat
80	MAA	Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe

Tabel 4
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Non Pegawai Tahun 2021

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2	Disdikbud	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
3	Disdikbud	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
4	Disdikbud	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5	Disdikbud	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
6	Disdikbud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
7	Disdikbud	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
8	Disdikbud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
9	Disdikbud	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
10	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
11	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
13	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
14	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
15	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
16	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
17	Dinkes	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
18	Dinkes	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
19	Satpol PP dan WH	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
20	Satpol PP dan WH	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
21	Satpol PP dan WH	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
22	Satpol PP dan WH	Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam
23	Satpol PP dan WH	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
24	Dinsos	Peningkatan kapasitas dan Pendampingan KAT
25	Dinsos	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
26	Dinsos	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
27	DP3AP2KB	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
28	DP3AP2KB	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
29	DP3AP2KB	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
30	DP3AP2KB	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
31	DP3AP2KB	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PARAF KOORDINASI
PEMBAKARSA | BAGIAN HUKUM

1	2	3
32	DP3AP2KB	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
33	DP3AP2KB	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
34	DP3AP2KB	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
35	DPN	Pembinaan Pertanahan Bagi Imeum Mukim/Keuchik
36	Disdukcapil	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
37	Disdukcapil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
38	Disdukcapil	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
39	Disdukcapil	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Di pertanggung jawabkan
40	Disdukcapil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
41	Disdukcapil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
42	Disdukcapil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
43	Disdukcapil	Komunikasi,Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
44	Disdukcapil	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
45	Disdukcapil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
46	DPMG	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja sama antar Desa
47	DPMG	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
48	Dishub	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
49	Dishub	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
50	DPMPTSP Naker	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
51	DPMPTSP Naker	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
52	DPMPTSP Naker	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
53	DPMPTSP Naker	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
54	DPMPTSP Naker	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
55	DPMPTSP Naker	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
56	DPMPTSP Naker	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
57	DPMPTSP Naker	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
58	DPMPTSP Naker	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
59	Disporapar	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
60	Disporapar	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
61	Disporapar	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
62	Disporapar	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
63	Disporapar	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
64	Disporapar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
65	Disporapar	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
66	Disporapar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
67	DKPPP	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
68	Disperindagkop	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
69	Disperindagkop	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
70	Disperindagkop	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
71	Setdako	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
72	Bappeda	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan informasi Perencanaan Pembangunan SKPK
73	BPKD	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
74	BPKD	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
75	BPKD	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
76	BPKD	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
77	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
78	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
79	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim
80	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
81	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
82	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim
83	Kec. Muara Satu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
84	Kec. Muara Satu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
85	Kec. Muara Satu	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim
86	Kec. Muara Dua	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
87	Kec. Muara Dua	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
88	Kec. Muara Dua	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim
89	DSIPD	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
90	DSIPD	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
91	DSIPD	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
92	DSIPD	Pembinaan Kemakmuran Masjid/Meunasah/ Mushalla
93	DSIPD	Pembinaan Qari Qariah
94	DSIPD	Pembinaan Hafizh Hafizhah

Tabel 5
Penyusunan, Penelitian, Pengkajian, Dokumen dan Pelaporan
Tahun 2020

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
2	Disdikbud	Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Migas Urusan Pendidikan
3	Disdikbud	Penyusunan Profil Pendidikan (OTSUS)
4	Dinkes	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
5	Dinkes	Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR)
6	Dinkes	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR)
7	Dinkes	Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR)
8	PUPR	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
9	PUPR	Revisi rencana tata ruang
10	Kesbangpol	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
11	Satpol PP dan WH	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
12	Satpol PP dan WH	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
13	Dinsos	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
14	DPMPTSP Naker	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
15	DPMPTSP Naker	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
16	DPMPTSP Naker	Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan
17	DPMPTSP Naker	Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan
18	DP3AP2KB	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
19	DKPPP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
20	DPN	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
21	DLH	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
22	Disdukcapil	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
23	Disdukcapil	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24	Disdukcapil	Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta-akta Pencatatan Sipil
25	DPMG	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
26	DPMG	Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besar Kota Lhokseumawe
27	DPMG	Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap gampong
28	DPMG	Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
29	Dishub	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
30	Diskominfo	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
31	Disperindagkop	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
32	Disporapar	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
33	Dispusip	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
34	Setdako	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
35	Setdako	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Pemko Lhokseumawe
36	Setdako	Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
37	Setdako	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
38	Setdako	Penyusunan Analisis Beban Kerja
39	Setdako	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
40	Setdako	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
41	Setdako	Penyusunan RKT dan TAPKIN
42	Setdako	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
43	Setdako	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ)
44	Setdako	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
45	Setdako	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
46	Setdako	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
47	Setdako	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
48	Setdako	Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek
49	Setdako	Penyusunan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai dengan APBK
50	Setdako	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
51	Setdako	Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah
52	Setdako	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
53	Setwan	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
54	Kec. Banda Sakti	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
55	Kec. Banda Sakti	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
56	Kec. Blang Mangat	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
57	Kec. Blang Mangat	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
58	Kec. Muara Satu	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
59	Kec. Muara Satu	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
60	Kec. Muara Dua	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
61	BPBD	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
62	BPBD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
63	Inspektorat	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
64	Inspektorat	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
65	Inspektorat	Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
66	Inspektorat	Reviu LKjIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
67	Inspektorat	Evaluasi LKjIP SKPK Kota Lhokseumawe
68	Inspektorat	Survei Penilaian Integritas
69	Inspektorat	Penyusunan PKPT Berbasis Risiko
70	Bappeda	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
71	Bappeda	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
72	Bappeda	Pelaksanaan Laporan Sistem Informasi Monitoring TEPRA (SISMONTEP)
73	Bappeda	Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian
74	Bappeda	Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)
75	Bappeda	Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assessment (EHRA)
76	Bappeda	Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
77	Bappeda	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
78	Bappeda	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
79	Bappeda	Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe
80	Bappeda	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
81	Bappeda	Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
82	Bappeda	Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)
83	Bappeda	Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK
84	Bappeda	Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe
85	Bappeda	Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
86	Bappeda	Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan
87	Bappeda	Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis
88	Bappeda	Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
89	Bappeda	Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah
90	Bappeda	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe
91	Bappeda	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe
92	Bappeda	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
93	Bappeda	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Lhokseumawe
94	BPKD	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
95	BPKD	Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
96	BPKD	Penyusunan Laporan Dana Transfer
97	BPKD	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus
98	BPKD	Penyusunan Analisa Standar Belanja
99	BPKD	Penyusunan Standar Satuan Harga
100	BPKD	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
101	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK
102	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK
103	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK
104	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK dan DPPA SKPK
105	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
106	BPKD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
107	BPKD	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPK
108	BPKD	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
109	BPKD	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
110	BPKD	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah
111	BPKD	Pengelolaan Pelaporan Keuangan
112	BPKD	Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
113	BPKD	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
114	BPKD	Penyusunan Perubahan KUA
115	BPKD	Penyusunan Perubahan PPAS
116	BPKD	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
117	BPKD	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPK
118	BPKD	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah
119	BPKD	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPK di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe
120	BKPSDM	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
121	BKPSDM	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Dengan Sistem E-Formasi
122	BKPSDM	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
123	DSIPD	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
124	MPU	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
125	Baitul Mal	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
126	MAA	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
127	MPD	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota
127	MPD	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kota

Tabel 6
Penyusunan, Penelitian, Pengkajian, Dokumen dan Pelaporan
Tahun 2021

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Disdikbud	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
3	Dinkes	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
5	Dinkes	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
7	PUPR	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8	PUPR	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
9	PUPR	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

PARAF KOORDINASI

PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
10	PUPR	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
11	PUPR	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
12	BPBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13	BPBD	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
14	BPBD	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
15	Satpol	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16	Satpol	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
17	Dinsos	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18	Dinsos	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
19	Dinsos	Rujukan Anak-Anak Terlantar
20	Dinsos	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
21	DP3AP2KB	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22	DP3AP2KB	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
23	DP3AP2KB	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
24	DP3AP2KB	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
25	DPN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26	DPN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
27	DLH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28	DLH	Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/ Kota
29	DLH	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
30	DLH	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA kabupaten/ Kota
31	Disdukcapil	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
32	Disdukcapil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
33	DPMG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34	DPMG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
35	Dishub	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36	Dishub	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
37	Dishub	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

PARAF KOORDINASI

PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
38	Diskominfo	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39	Diskominfo	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
40	DPMPTSP Naker	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
41	DPMPTSP Naker	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
42	DPMPTSP Naker	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
43	DPMPTSP Naker	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
44	Disporapar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45	Dispusip	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46	Dispusip	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
47	DKPPP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48	DKPPP	Penyusunan DED
49	Disperindagkop	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50	Disperindagkop	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
51	Disperindagkop	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
52	Setdako	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
53	Setdako	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
54	Setdako	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
55	Setdako	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
56	Setdako	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
57	Setdako	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
58	Setwan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
59	Setwan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
60	Setwan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
61	Setwan	Penyusunan Program Kerja DPRD
62	Setwan	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
63	Bappeda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
64	Bappeda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
65	Bappeda	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
66	Bappeda	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
67	Bappeda	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
68	Bappeda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
68	Bappeda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

PARAF KOORDINASI

PEMBUKA KARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
69	Bappeda	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
70	Bappeda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
71	Bappeda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
72	BPKD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
73	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
74	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
75	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
76	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK
77	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK
78	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
79	BPKD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
80	BPKD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
81	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
82	BPKD	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
83	BPKD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
84	BPKD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPK, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
85	BPKD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota
86	BPKD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Melebihi Pagu Validasi
87	BPKD	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
88	BPKD	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
89	BPKD	Penyusunan Standar Harga

1	2	3
90	BPKD	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
91	BPKD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
92	BPKD	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
93	BPKD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
94	BPKD	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
95	BKPSDM	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
96	BKPSDM	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
97	BKPSDM	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
98	BKPSDM	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
99	BKPSDM	Evaluasi Disiplin ASN
100	Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
101	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
102	Inspektorat	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
103	Inspektorat	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
104	Inspektorat	Pengawasan Desa
105	Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
106	Inspektorat	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
107	Inspektorat	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
108	Inspektorat	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
109	Kec. Banda Sakti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
110	Kec. Blang Mangat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
111	Kec. Muara Satu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
112	Kec. Muara Dua	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
113	Kesbangpol	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
114	Kesbangpol	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
115	Kesbangpol	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
116	Kesbangpol	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
117	Kesbangpol	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

PARAF KOORDINASI
PEMBAKARSA | BAGIAN HUKUM

1	2	3
118	Kesbangpol	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
119	DSIPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
120	DSIPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
121	Baitul Mal	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
122	Baitul Mal	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
123	Baitul Mal	Penyusunan Perencanaan ZISWAF
124	MAA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
125	MPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
126	MPD	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

Tabel 7
Penyelenggaraan *Event* Tahun 2020

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Peringatan Hari Aksara Internasional (DID)
2	Disdikbud	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan HAI (OTSUS)
3	Disdikbud	Penyelenggaraan UN dan UAS (DID)
4	Disdikbud	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (DID)
5	Disdikbud	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) (DID)
6	Disdikbud	Liga Sepak Bola (GALA) SMP (DID)
7	Disdikbud	Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP (DID)
8	Disdikbud	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
9	Disdikbud	Audisi Paduan suara Gita Bahana Nusantara
10	Dinkes	Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan (DBH-PR)
11	Dinkes	Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (DBH-PR)
12	Dinkes	Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DBH-PR)
13	Dinkes	Pemilihan Duta Anti Narkoba (DBH-PR)
14	Dinkes	Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) (DBH-PR)
15	Dinkes	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR)
16	Dinkes	Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR)
17	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan (DBH-PR)
18	Dinkes	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DBH-PR)
19	Dinkes	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan (DBH-PR)
20	DP3AP2KB	Hari Anak Nasional

PARAF KOORDINASI
PEMBAKANSA | BAGIAN HUKUM

1	2	3
21	DP3AP2KB	Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu
22	DP3AP2KB	Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe
23	DP3AP2KB	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)
24	DP3AP2KB	Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera
25	DP3AP2KB	Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes)
26	DP3AP2KB	Kegiatan Penilaian dan Pembinaan KB Lestari
27	DP3AP2KB	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
28	DKPPP	Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA
29	DKPPP	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal
30	DKPPP	Expo/Kontes Ternak
31	DLH	Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup
32	DPMG	Perlombaan Desa dan Kelurahan
33	DPMG	Gelar Inovasi Desa
34	DPMG	Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe)
35	Dishub	Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
36	Disporapar	Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe
37	Disporapar	Pelaksanaan Turnamen Menembak MUSPIDA Cup Lhokseumawe
38	Disporapar	Pelaksanaan Turnamen Panahan MUSPIDA Cup Lhokseumawe
39	Disporapar	Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA Cup Lhokseumawe
40	Disporapar	Persiapan dan Keikutsertaan POPDA (OTSUS)
41	Disporapar	Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe
42	Disporapar	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe
43	Disporapar	Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe
44	Disporapar	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
45	Dispusip	Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe
46	Dispusip	Lomba Bercerita Hikayat Daerah
47	Disperindagkop	Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga Pasar
48	Disperindagkop	Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM
49	Disperindagkop	Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe
50	Setdako	Seleksi dan Pembinaan Bapor KORPRI Kota Lhokseumawe
51	Setdako	Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI
52	Setdako	Keikutsertaan Event MTQ KORPRI
53	Setdako	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
54	Setdako	Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra
55	Setdako	Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra
56	Setdako	Peringatan HUT KORPRI di Kota Lhokseumawe
57	Setdako	Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

PARAF KOORDINASI

PEMBAHARSA	BAGIAN HUKUM

1	2	3
58	Setdako	Anjangsana Ramadhan
59	Setdako	Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi Dan Dokumentasi
60	Kec. Banda Sakti	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
61	Kec. Banda Sakti	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olahraga
62	Kec. Blang Mangat	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
63	Kec. Blang Mangat	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olahraga
64	Kec. Muara Satu	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
65	Kec. Muara Dua	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, Dll)
66	Kec. Muara Dua	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olahraga
67	Bappeda	Sayembara/Lomba Grand Design pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe
68	BKPSDM	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
69	BKPSDM	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
70	DSIPD	Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam
71	DSIPD	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Lhokseumawe
72	Baitul Mal	Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal

Tabel 8
Penyelenggaraan *Event* Tahun 2021

No	SKPK	Uraian
1	2	3
1	Disdikbud	Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2	Disdikbud	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3	Disdikbud	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
4	Dinkes	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
5	Dinkes	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
6	Dinkes	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
7	DP3AP2KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8	DPMG	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
9	DPMG	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
10	Disporapar	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
11	Disporapar	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
12	DKPPP	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

PARAF KOORDINASI
PERUNDANG-UNDANGAN | BAGIAN HUKUM

1	2	3
13	Disperindagkop	Pameran Dagang Nasional
14	Disperindagkop	Pameran Dagang Lokal
15	Disperindagkop	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota
16	DSIPD	Pelaksanaan MTQ
17	DSIPD	MTQ Tingkat Kota dan Provinsi
18	DSIPD	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam
19	DSIPD	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
20	Setdako	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
21	Kec. Banda Sakti	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
22	Kec. Blang Mangat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23	Kec. Muara Satu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24	Kec. Muara Dua	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Penginputan Data

Data kegiatan dalam setiap kelompok ASB akan diinput dalam format sebagai berikut:

Tabel 9
Format Input Data SKPK

Dinas :	
Nama Sampel :	
Tahun :	

No	Rincian Objek Belanja	Jumlah	%
1			
2			
3			
dst			
		Rp.	-

Nama sampel merupakan nama kegiatan yang termasuk sampel dalam kelompok ASB. Tahun adalah tahun kegiatan tersebut terjadi. Rincian objek belanja merupakan pos belanja-belanja yang dianggarkan pada level kode rekening rincian objek dalam kegiatan serta persentasenya dalam total anggaran kegiatan. Belanja-belanja yang serupa bisa digabungkan menjadi satu nama belanja. Seluruh kegiatan akan diinput dengan format yang sama dalam *sheet* yang berbeda.

e. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan menggunakan statistika inferensi yaitu *student-t distribution* dimana data yang digunakan <30 dan standar deviasi tidak diketahui. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI
PEMERIKSA | BAGIAN HUKUM

$$X \pm t\frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

Keterangan:

X: Nilai belanja

t: Nilai yang diambil dari t-tabel, dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $(n-1)$

s: Standar deviasi

n: Ukuran sampel

Pengolahan data tersebut akan menghasilkan *output* berupa nilai rata-rata, nilai maksimal (batas atas), dan nilai minimal (batas bawah) baik dalam jumlah rupiah maupun dalam persentase. Format pengisian olah data adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Format Olah Data

	Rata-rata	Deviasi Standar	Min	Max	Nilai-t	Batas Bawah	Batas Atas
Y	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
X_1							
X_2							
dst							

Kolom paling atas akan diisi dengan nominal rupiah, sedangkan kolom berwarna putih akan diisi dengan nilai persentase. X_1 sampai X_3 menunjukkan objek belanja dalam setiap kegiatan. Setelah itu, format dari *output* pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Format *Output* Pengolahan Data

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	Rp	Rp	Rp

No	Rincian Objek Belanja	% Alokasi Belanja		
		Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1				
2				
3				
dst				

Output merupakan rangkuman dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Di dalam output, hanya dituliskan hasil akhir dari olahan data yakni berupa nilai rata-rata serta nilai maksimal (batas atas) dan nilai minimal (batas bawah). Untuk memenuhi prinsip kewajaran belanja, setiap kegiatan wajib memenuhi syarat nilai maksimal dan minimalnya baik dalam persentase maupun dalam

PARAF KOORDINASI
PEMBANDARA | BAGIAN HUKUM

jumlah rupiahnya. Jadi, apabila ada suatu kegiatan yang alokasi persentase belanjanya masih dalam cakupan (*range*) namun jumlah nominal rupiahnya sudah melebihi batas maksimal atau minimalnya, maka anggaran kegiatan tersebut tetap tidak bisa dikatakan wajar, begitu pula sebaliknya.

4. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki ruang lingkup dan juga keterbatasan sendiri, antara lain:

a. ASB ini dibentuk dari sampel kegiatan tahun 2020 dan 2021, sehingga besaran kegiatan maupun biaya variabel yang tercantum merupakan nilai dari kegiatan 2 (dua) tahun tersebut.
b. ASB dibentuk tanpa mengetahui nominal jelas dari *cost driver*, sehingga tidak dapat ditentukan biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya *variabel cost*nya. Jadi, pengaplikasian ASB ini hanya bisa dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang sejenis (termasuk besaran kegiatannya) dengan yang pernah terjadi sebelumnya.
c. ASB ini hanya mengakomodir jenis kegiatan rutin atau umum dan belum mengakomodir jenis kegiatan khusus SKPK. Dengan demikian, maka untuk kedepannya perlu disusun kembali ASB untuk sampel kegiatan khusus SKPK.
d. Kelemahan berdasarkan evaluasi empiris dan hasil analisis uji t adalah suatu kegiatan diasumsikan hanya memiliki satu karakteristik, sehingga digunakan *cost driver* tunggal. Kegiatan dengan komponen biaya sedikit akan memperoleh besaran alokasi biaya yang sama dengan kegiatan komponen biaya yang banyak. Besaran alokasi anggaran yang sama dengan karakteristik kegiatan yang berbeda. Akibatnya, kegiatan yang memiliki komponen biaya sedikit akan mengalami surplus, dan sebaliknya bagi kegiatan yang memiliki komponen biaya banyak akan defisit. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dikembangkan model penghitungan ASB yang lebih adil dan akuntabel dengan karakteristik aktivitas kegiatan.

5. *OUTPUT* ASB

Output ASB dibagi kedalam beberapa kelompok berdasarkan data yang sudah lengkap atau cukup lengkap. *Output* dikerjakan dengan pada bagian kerta kerja dalam *microsoft excel* yang memuat seluruh inventarisasi kegiatan yang

berisi informasi mengenai belanja setiap objek. Untuk mempermudah duplikasi antara satu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya, maka di dalam *excel* dibuat formula. Beberapa formula yang tersedia dalam *excel* adalah perhitungan untuk:

a. rata-rata : "=average(...)"
b. deviasi standar : "=stdev.s(...)"
c. nilai minimum dan maksimum : "=min(...)" dan "=max(...)"
d. nilai statistik-t : "=T.INV.2T(α;n-1)"
e. derajat bebas: : "=n-1"
f. batas bawah : "=rata-rata b_1-(stdev.s b_1*nilai t/sqrt derajat bebas b_1
g. batas atas : "=rata-rata n_1-(stdev.s n_1*nilai t/sqrt derajat bebas b_1

Keterangan:

b_1 = kategori ASN
Sqrt , = akar kuadrat
α (*alpha*) = 5 persen (%) adalah tingkat signifikansi statistik, dengan kata lain tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 persen (%).
n = banyaknya sampel. Selain menggunakan formula yang tersedia dalam *microsoft excel* untuk menghitung nilai statistik, di dalam perhitungan satu kegiatan dengan kegiatan lain menggunakan rumus.

Hasil perhitungan ASB ditampilkan dalam penjelasan tiap ASB berikut *output*nya:

Tabel 12
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	13,268,342	6,005,134	20,530,919

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Pegawai	0,266	0,188	0,533
2	Belanja Alat Tulis Kantor	3,115	2,698	4,540
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,445	3,852	6,471
4	Belanja Makan Minum	6,692	5,843	9,594
5	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor	18,526	21,892	7,033
6	Belanja Bahan Bakar Minyak, Suku Cadang dan Pajak Kendaraan	14,104	16,937	4,420
7	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS)	4,641	3,642	8,059

8	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	3,509	3,306	4,206
9	Belanja Jasa Kantor	6,704	6,131	8,644
10	Belanja Uang Hadiah	1,019	1,081	0,806
11	Belanja Dokumentasi	0,334	0,352	0,271
12	Belanja Publikasi	1,314	1,463	0,802
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor	5,244	4,821	6,689
14	Belanja Perjalanan Dinas	5,658	4,707	8,908
15	Belanja Uang Saku Peserta	12,664	12,831	12,094
16	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11,765	10,255	16,929
Total		100,00	100,00	100,00

Tabel 13
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Non Pegawai

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	25,581,906	9,051,211	42,112,576

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Pegawai	0,11	0,07	0,29
2	Belanja Alat Tulis Kantor	2,05	1,74	3,47
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,62	2,28	4,17
4	Belanja Makan Minum	3,24	2,57	6,38
5	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor	4,19	3,98	5,16
6	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,51	1,43	1,87
7	Belanja Pakaian Dinas	3,96	3,83	4,59
8	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS)	2,37	1,68	5,58
9	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	1,66	1,28	3,45
10	Belanja Jasa Kantor	2,68	2,03	5,70
11	Belanja Uang Hadiah	7,50	7,53	7,37
12	Belanja Pemeliharaan	3,02	3,60	0,33
13	Belanja Dokumentasi	0,10	0,08	0,19
14	Belanja Publikasi	0,58	0,51	0,94
15	Belanja Sewa Gedung/Kantor	2,15	1,74	4,05
16	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan	1,21	1,26	1,00
17	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,92	1,00	0,56
18	Belanja Perjalanan Dinas	5,06	3,92	10,38
19	Belanja Uang Saku Peserta	2,89	2,22	5,97
20	Belanja Barang	4,79	5,30	2,42

21	Belanja Hibah/Bansos	41,16	46,77	15,05
22	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6,22	5,18	11,08
Total		100,00	100,00	100,00

Tabel 14
Penyusunan, Penelitian, Pengkajian, Dokumen dan Pelaporan

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	27,527,938	10,678,519	44,377,558

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Pegawai	0,15	0,10	0,37
2	Belanja Alat Tulis Kantor	0,93	0,71	1,85
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,25	0,98	2,33
4	Belanja Makan Minum	1,28	0,98	2,54
5	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor	0,28	0,34	0,04
6	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,52	1,65	0,95
7	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS)	6,41	4,58	13,99
8	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	2,51	1,99	4,67
9	Belanja Honorarium Kegiatan Fisik	64,96	69,85	44,60
10	Belanja Jasa Kantor	7,79	7,25	10,05
11	Belanja Uang Hadiah	3,07	3,30	2,10
12	Belanja Publikasi	0,13	0,14	0,12
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor	0,73	0,77	0,55
14	Belanja Perjalanan Dinas	7,38	5,56	14,95
15	Belanja Uang Saku Peserta	1,63	1,80	0,89
Total		100,00	100,00	100,00

Tabel 15
Penyelenggaraan *Event*

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	10,051,670	6,094,710	14,008,631

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Pegawai	1,34	1,20	1,67
2	Belanja Alat Tulis Kantor	1,21	1,19	1,25
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,03	7,20	9,93
4	Belanja Makan Minum	4,22	4,46	3,68
5	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,48	2,51	2,41
6	Bahan Material	3,47	4,96	0,04

7	Belanja Pakaian Dinas	8,00	7,45	9,26
8	Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS)	4,97	4,35	6,41
9	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	5,40	5,08	6,15
10	Belanja Jasa Kantor	6,91	6,26	8,40
11	Belanja Uang Hadiah	6,51	6,11	7,43
12	Belanja Dokumentasi	0,44	0,48	0,36
13	Belanja Publikasi	1,58	1,67	1,38
14	Belanja Sewa Gedung/Kantor	6,57	6,59	6,53
15	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan	4,38	4,52	4,07
16	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,31	4,04	1,65
17	Belanja Perjalanan Dinas	11,55	11,99	10,55
18	Belanja Uang Saku	6,40	6,00	7,33
19	Belanja Hibah/Bansos	9,84	9,75	10,04
20	Belanja Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3,38	4,21	1,47
Total		100,00	100,00	100,00

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPK dalam satu tahun anggaran. Proses ASB ini dilakukan dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK. Tiap SKPK perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini melakukan studi perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Studi ini wajib dilaksanakan dan diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

ASB di Pemerintah Kota Lhokseumawe ini dilakukan dengan menginventarisir data sampel kegiatan pada tahun 2020 dan 2021 di 34 SKPK. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun anggaran 2021 telah dimutakhirkan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur terbaru

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2109. Kegiatan yang dilakukan analisis ASB merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau hampir seluruh SKPK cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPK tertentu atau disebut dengan ASB umum. Berikut adalah jenis ASB umum yang dilakukan analisis:

a. sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
b. sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, pendidikan dan pelatihan non pegawai;
c. penyusunan, penelitian, pengkajian, dokumen dan pelaporan;
d. penyelenggaraan *event*.

Keempat jenis ASB ini menentukan sampel yang digunakan dalam perhitungan dan juga mempengaruhi hasil karena pengolahan batas bawah dan atas menggunakan pendekatan statistika terutama distribusi *student-t*. Semakin besar jumlah sampel, maka semakin baik distribusi dan semakin mendekati distribusi normal secara hipotesis. Jumlah data yang kurang dalam perhitungan menunjukkan bahwa nilai interval Analisis Standar Belanja (ASB) memiliki keakuratan yang rendah.

Sementara itu, dalam pengerjaan studi ASB ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi evaluasi dalam penyusunan ASB tahun berikutnya:

a. membakukan cara perhitungan rincian anggaran belanja, misalkan untuk belanja bimbingan teknis harus jelas jumlah orang atau peserta dan jumlah hari pelaksanaannya;
b. mengintegrasikan sistem analisa standar belanja kedalam sistem yang ada, misalkan ke sistem penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah;
c. untuk mendapatkan jumlah sampel yang cukup banyak dan signifikan, maka manajemen *database* penting. Data-data kegiatan sebaiknya dijaga dari tahun ke tahun karena data yang digunakan adalah *time-series*;
d. beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai perhitungan *cost-driver* harus diidentifikasi dan dibuat inventarisasi;
e. penggunaan distribusi-t dan regresi secara empiris dapat saling melengkapi. Pilihan untuk menggunakan antara satu dan yang lain tergantung kepada jumlah data yang dimiliki. Apabila jumlah sampel yang dimiliki cukup besar (di atas 10), maka penggunaan regresi dapat dimungkinkan;

f. dapat dijadikan sebagai pengukuran kewajaran anggaran, indikator lain seperti Standar Satuan Harga (SSH) juga dapat digunakan sebagai pendamping. Oleh karena itu, pemutakhiran indikator Standar Satuan Harga (SSH) harus dilakukan;

g. anggaran selalu berubah dari tahun ke tahun, maka Analisis Standar Belanja (ASB) perlu dilakukan *update* setiap tahun supaya mencerminkan nilai yang sebenarnya dari tahun yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA